



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Q

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

0

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. BLUD RSUD dan RSJD yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD.
9. Pemimpin BLUD RSD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSD Provinsi Jawa Tengah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSD.
16. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD RSD yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSD yang tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah.
18. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Prinsip-prinsip penganggaran BLUD;
- b. Penyusunan RBA;
- c. Pengajuan Anggaran BLUD;



- d. Penetapan dan pelaksanaan Anggaran BLUD;
- e. Perubahan Anggaran BLUD.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD RSD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- c. BLUD RSD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. BLUD RSD menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Seluruh pendapatan BLUD RSD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan.
- f. Pendapatan BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD.
- g. Pagu Anggaran BLUD RSD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja.
- h. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSD sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam RBA.
- i. Pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

BAB IV PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan RBA

Pasal 5

- (1) BLUD RSD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLUD; dan
 - b. Pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.

- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan di dalam DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari:
 - a. *policy statement* oleh pimpinan.
 - b. tingkat pusat pertanggungjawaban.
 - c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran.
 - d. tingkat direksi dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD RSD telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal BLUD RSD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari :

- a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. penerimaan lainnya yang sah;
- e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN; dan/atau
- f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 8

RBA paling sedikit memuat:

- a. Program dan kegiatan;
- b. target kinerja (output);
- c. kondisi kinerja tahun berjalan;
- d. asumsi makro dan mikro;
- e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. perkiraan biaya; dan
- g. prakiraan maju (*forward estimate*).

Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan target kinerja (output) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSD.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD RSD.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSD.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD RSD tersebut.

- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA paling kurang sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.
- (12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penjabaran Anggaran BLUD

Pasal 10

- (1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
- (2) Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisah dari RBA.

Pasal 13

- (1) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.

→ 9

Bagian Ketiga
Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 14

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran BLUD RSD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 15

- (1) BLUD RSD mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan biaya yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD RSD selain yang bersumber dari APBD/APBN.
- (4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD RSD, meliputi belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD, dan dari saldo awal kas BLUD.
- (5) Contoh format ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan tiga jenis belanja
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- (5) Tiga Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang/Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

/ Q

- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a merupakan belanja pegawai langsung yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (7) Belanja barang/jasa yang didanai dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan dan pendukungnya.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya di lingkungan RSD.
- (9) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

BAB V PENGAJUAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Proses Penganggaran BLUD

Pasal 17

Proses Penganggaran BLUD RSD dilakukan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS, BLUD RSD menyusun RBA dan ringkasan RBA.
- b. Setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD.
- c. Bagian Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- d. BLUD RSD memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan.
- e. Ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Pengajuan Ringkasan RBA

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan ringkasan RBA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
RBA Definitif

Pasal 19

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 21

DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.

Pasal 22

Berdasarkan RBA definitif BLUD RSD merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

Pasal 23

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam RBA.

Pasal 24

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Fleksibilitas Anggaran

Pasal 25

Anggaran belanja BLUD RSD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

Pasal 26

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase ambang batas dicantumkan dalam APBD dan DPA.
- (5) Pencantuman persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD RSD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD RSD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sebelum penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (2) Belanja BLUD RSD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD RSD.

Bagian Kedua Perubahan RBA

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan.
 - b. Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan

— 0

- kebutuhan pelayanan.
- c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Dewan Pengawas BLUD dan melaporkannya kepada PPKD pada kesempatan awal.
 - d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **19 Desember 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **19 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO ~~KARTO~~ SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 90

8

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD/RSJD
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN
(R B A)**

TAHUN 20XX

KATA PENGANTAR

(memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh Pemimpin BLUD).

....., 20XX

Pemimpin BLUD

.....

.....

9

RINGKASAN EKSEKUTIF

(memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun).



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS.....	
BAB II. KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 20XX	
A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA	
1. Faktor Internal	
2. Faktor Eksternal	
B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI	
1. Aspek Mikro	
2. Aspek Makro	
C. PENCAPAIAN KINERJA	
1. Non Keuangan.....	
2. Keuangan	
a. Realisasi Pendapatan	
1) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan	
2) Realisasi Total Pendapatan	
b. Realisasi biaya	
1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit layanan	
2) Realisasi Total Biaya	
c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan	
1) Investasi	
2) Pendanaan	
D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN (BERJALAN)	
1. Neraca	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Arus Kas	

4. Catatan atas Laporan Keuangan
BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20XX+1
A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN
1. Aspek Makro.....
2. Aspek Mikro.....
C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN
D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
1. Program.....
2. Kegiatan.....
E. PERKIRAAN PENDAPATAN
1. Pendapatan BLUD
2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit
F. PERKIRAAN BIAYA
1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan.....
2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional
3. Biaya berdasarkan Komponen dan Anggarannya
G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI
1. Perkiraan Penerimaan Investasi
2. Pengeluaran Investasi
H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN
1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan
2. Pengeluaran Pendanaan
I. ANGGARAN BLUD
1. Anggaran Pendapatan BLUD berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual).....
3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)
4. Anggaran Belanja (Basis Kas)
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan
J. AMBANG BATAS RBA



BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX+1

- A. NERACA
- B. LAPORAN OPERASIONAL
- C. LAPORAN ARUS KAS
- D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

BAB V. PENUTUP

- A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI KEGIATAN BLUD
- B. KESIMPULAN

LAMPIRAN

RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK KONSOLIDASI DENGAN APBD

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

(berisi keterangan ringkas mengenai eksistensi, perkembangan RS dan kegiatan pokok BLUD).

.....
.....

B. MAKSUD DAN TUJUAN

(memuat maksud dan tujuan penerapan PPK- BLUD di RS).

.....
.....

C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS

(memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan Dewas).

.....
.....

BAB II

KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).

.....

.....

1. Faktor Internal

(Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- pelayanan;
 - keuangan;
 - organisasi dan sumber daya manusia;
 - sarana dan prasarana)
-
-

a. Pelayanan Medis

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

b. Organisasi dan SDM

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

c. Keuangan

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

→ 8

d. Sarana dan Prasarana

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2. Faktor Eksternal

(Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:

- *peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;*
- *kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;*
- *perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;*
- *perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;*
- *keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis;*
- *keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.)*

a. UU dan PP yang terkait dengan BLUD

.....
.....

b. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk RSD

.....
.....

c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....
.....

d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

.....
.....



e. Status sebagai RSD

.....

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

.....

g. Globalisasi Ekonomi

.....

h. Ancaman Bencana Nasional

.....

i. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS

.....

j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran

.....

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI

1. Aspek Makro

NO.	INDIKATOR EKONOMI	ASUMSI 20XX	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)		
2.	Tingkat Inflasi (%)		
3.	Pertumbuhan Pasar (%)		
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)		
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)		
6.	Dst.....		

(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah setempat).

2. Aspek Mikro

NO.	INDIKATOR	ASUMSI 20XX	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi PSO		
2.	Perubahan tarif layanan		
3.	Pengembangan produk baru		
4.	Peningkatan volume layanan		

→ Q

5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan		
6.	Dst.....		

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. PENCAPAIAN KINERJA

1. Non Keuangan

a. Kegiatan Pelayanan (berdasarkan unit)

No.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 20XX			KET (%)
			Target	Realisasi (s/d bln..)	Prognosa	
1	Instalasi Gawat Darurat					
2	Instalasi Rawat Jalan					
3	Instalasi Rawat Inap					
4	Instalasi Rawat Intensif					
5	Instalasi Bedah Sentral					
6	Instalasi Laboratorium					
7	Instalasi Radiologi					
8	Instalasi Rehab.Medik					
9	Inst.Ked Forensik & ML					
10	Instalasi Farmasi					
11	Instalasi CSSD					
12	Instalasi Sanitasi					
13	Instalasi IPSRS					
14	Instalasi Gizi					
15	Pelayanan Fungsional Lainnya					
	Jumlah					

Catatan : jika data per unit layanan belum dimiliki, data kinerja keuangan dapat dibuat seperti berikut ini

b. Pelayanan (berdasarkan kelompok)

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 20XX			KET (%)
			Target	Realisasi (S/D Bln..)	Prognosa	
1	Kunjungan Rwt Jalan					

2	Kunjungan IGD					
3	Pasien Rawat Inap					
4	B O R					
5	L O S					
6	T O I					
7	Dst.....					

Catatan :

1. Kinerja non keuangan dapat pula dilihat dari perspektif Balance Scorecard, yaitu dengan menyampaikan data pencapaian kinerja dilihat dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran SDM.
2. Selain dengan perspektif balance scorecard, kinerja non keuangan dapat juga disampaikan dari sasaran dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing unit pelayanan.

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

2. Keuangan

memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran, sekurang-kurangnya meliputi:

- pendapatan;
- biaya;
- investasi;
- pendanaan; dan
- analisis keuangan lainnya, seperti:
 - likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
 - solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
 - aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan;
 - rentabilitas meliputi pendapatan operasional dibagi biaya operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
 - produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
 - efisiensi (output dibandingkan input)

a. Realisasi Pendapatan

NO	UNIT PELAYANAN	PENDAPATAN TAHUN 20XX			Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	
1	UNIT PELAYANAN				
a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				

↗ Q

f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				
n.	Instalasi Gizi				
o.	dst.....				
2	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a.	Unit Kerja Akuntansi				
b.	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
c.	Unit Kerja Sekretariat				
d.	Unit Kerja Diklat				
e.	Unit Kerja Pelayanan				
f.	Unit Kerja Penunjang				
g.	Unit Kerja Kepegawaian				
h.	Unit Kerja Keperawatan				
i.				
TOTAL PENDAPATAN					

b. Realisasi Biaya

1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan

NO	UNIT PELAYANAN	BIAYA TAHUN 20XX			
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	Selisih (%)
1	UNIT PELAYANAN				
a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				
f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				

n.	Instalasi Gizi				
o.	dst.....				
2	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a.	Unit Kerja Akuntansi				
b.	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
c.	Unit Kerja Sekretariat				
d.	Unit Kerja Diklat				
e.	Unit Kerja Pelayanan				
f.	Unit Kerja Penunjang				
g.	Unit Kerja Kepegawaian				
h.	Unit Kerja Keperawatan				
i.				
	JUMLAH				

Catatan : Apabila sistem informasi keuangan belum memungkinkan mengemukakan data seperti pada tabel diatas (biaya berdasarkan jenis layanan), maka minimal dapat mengemukakan data biaya seperti pada tabel dibawah ini (sesuai RBA).

2) Realisasi Total Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20XX	Realisasi s/d	Prognosa Thn 20XX+1	Capaian	Ket
1	2	3	4	5 =(4)/(2)	6
A. Biaya Pelayanan					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan ¹					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
B. Biaya Umum Dan Administrasi					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
C. Biaya Non Operasional					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					

¹ Termasuk harga pokok barang yang dijual.

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20XX	Realisasi s/d	Prognosa Thn 20XX+1	Capaian	Ket
1	2	3	4	5 =(4)/(2)	6
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
Jumlah Biaya (A+B+C)					

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan

1) Investasi

No	Jenis Investasi	Anggaran Th. 20XX	Realisasi s.d	Capaian (%)	Ket
1.	Pelepasan aset				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst.....				
2.	Pencairan investasi				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst.....				
	Jumlah				

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

→ 0

Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI														Capaian (%)	Ket	
		Jasa layanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jumlah				
		Anggaran Th 2013	Realisasi Sd...	Anggaran Th 2013	Realisasi Sd...	Anggaran Th 2013	Realisasi Sd ...	Anggaran Th 2013	Realisasi Sd ...	Anggaran Th 2013	Realisasi Sd..	Anggaran Th 2013	Realisasi Sd ...					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Tanah																	
2.	Peralatan dan mesin																	
3.	Gedung dan bangunan																	
4.	Kendaraan																	
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor																	
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan																	
7.	Aset sewa guna usaha																	
8.	Surat utang ² dan surat modal ³ .																	
9.	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																	
10.	Sistem Informasi																	
11.	Dst.....																	
	Jumlah																	

² Contoh surat utang: SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

³ Contoh surat modal: Saham

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....
.....

2) Pendanaan

a) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Penarikan Pinjaman dari				
2.	Dst.....				
	Jumlah				

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....
.....

b) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Pembayaran utang kepada.....				
2.	Dst.....				

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....
.....

D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

1. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

KOMPONEN	ANGGARAN 20XX	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TH. 20XX	SELISIH %
I ASET				
A Aset Lancar				
1) Kas dan Setara Kas				

2)	Investasi jk. Pendek				
3)	Piutang Usaha				
4)	Piutang Lain-lain				
5)	Persediaan				
6)	Uang Muka				
7)	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima				
8)	Dst.....				
	Jumlah Aset Lancar				
B	Investasi Jangka Panjang				
C	Aset Tetap				
1)	Tanah				
2)	Bangunan & Gedung				
3)	Peralatan & Mesin				
4)	Kendaraan				
5)	Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
6)	Jalan, irigasi dan peralatan kantor				
7)	Dst.....				
	Jumlah Aset Tetap				
	Akumulasi Penyusutan				
	Nilai Buku Aset Tetap				
D	Aset Lain-Lain				
1)	Aset tak berwujud				
2)	Konstruksi dalam pengerjaan				
5)	Dst.....				
	Jumlah Aset Lain-Lain				
JUMLAH ASET (A + B + C+D)					
II KEWAJIBAN					
A	Kewajiban Jangka Pendek				
1)	Hutang Usaha				

2) Hutang Pajak				
3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
5) Pendapatan yang Diterima Dimuka				
6) Dst.....				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B Kewajiban Jangka Panjang				
1) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2) Dst.....				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)				
III EKUITAS				
1) Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (deficit) sampai dengan periode tahun lalu				
c. Surplus (defisit) tahun berjalan				
2) Terikat Permanen				
3) Terikat Kontemporer				
4) Hibah				
5) Donasi				
6) Dst.....				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (II+III)				

2. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 20XX

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TH. 20XX	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TH. 20XX	SELISIH %
A.	PENDAPATAN BLUD				
	1) Jasa Layanan				
	2) Hibah				
	3) Hasil Kerjasama				
	4) Pendapatan dari APBD				
	5) Pendapatan dari APBN				
	6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
B	BIAYA OPERASIONAL				
	1) Biaya Pelayanan				
	2) Biaya Umum dan Administrasi				
	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (1+2)				
	SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL (A-B)				
C	PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
D	BIAYA NON OPERASIONAL				
	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN				
	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS-POS LUAR BIASA				
	1) Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa				
	2) Biaya dari Kejadian Luar Biasa				
	SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH				

— 2

3. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS TAHUN 20XX (Metode langsung)

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TH. 20XX	REALISASI s/d 30 Juni (Rp)	PROGNOSA TH. 20XX	SELISIH %
ARUS KAS DARI AKTIVITAS					
A OPERASIONAL					
Arus Masuk					
1	Jasa Layanan				
2	Hibah				
3	Hasil Kerjasama				
4	Pendapatan dari APBD				
5	Pendapatan dari APBN				
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang				
6	Sah				
Arus Keluar					
1	Biaya Pelayanan				
2	Biaya Umum dan Administrasi				
3	Biaya Lain-lain				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS					
B INVESTASI					
Arus Masuk					
1	Hasil Penjualan Aset Tetap				
2	Hasil Investasi				
3	Dst				
Arus Keluar					
1	Perolehan Aset Tetap				
2	Pembelian Investasi				
3	Perolehan Aset Lainnya				
4	Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas					

9

Investasi				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS				
C PENDANAAN				
1 Penerimaan Pinjaman dari				
2 Dst.				
Arus Kas Keluar				
1 Pembayaran pinjaman kepada				
2 Dst.				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX
(Metode tidak langsung)**

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TH. 20XX	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TH. 20XX	SELISIH %
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS				
A	OPERASIONAL				
1	Surplus (defisit) Tahun Berjalan				
2	Penyesuaian ke Dasar Kas				
	a Biaya Penyusutan dan Amortisasi				
	b Kerugian Penurunan Nilai				
	c Pembayaran bunga				
	d Dst.				
3	Perubahan Aset Lancar				
	a Investasi Jangka Pendek				
	b Piutang Usaha				
	c Piutang Lain-lain				
	d Persediaan				
	e Uang Muka				
	Pendapatan yang Masih Harus				
	f Diterima				

→ 9

4	Perubahan Kewajiban Jangka Pendek				
	a Hutang Usaha				
	b Hutang Pajak				
	c Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Jk. Pjg. yg Jatuh Tempo dalam 1 th				
	e Pendapatan yang Diterima di Muka				
	f Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS					
B INVESTASI					
	Arus Masuk				
	1 Hasil Penjualan Aset Tetap				
	2 Hasil Investasi				
	3 Dst.				
	Arus Kas Keluar				
	1 Perolehan Aset				
	2 Pembelian Investasi				
	3 Perolehan Aset Lainnya				
	4 Dst.				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS					
C PENDANAAN					
	Arus Kas Masuk				
	1 Penerimaan Pinjaman dari				
	2 Dst.				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
	Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal				
	Kas dan Setara Kas Akhir				

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Dijelaskan hal-hal yang ada relevansinya dengan laporan keuangan, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Umum

9

- b. Kebijakan Akuntansi
- c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
- d. dan hal-hal lain yang dipandang perlu

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal Dan Periode.....

a. Umum

.....

.....

b. Kebijakan Akuntansi (mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)

.....

.....

c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

(Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha).

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Thn. 20XX	Realisasi s.d	Prognosa	Selisih (%)
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank				
Jumlah				

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Anggaran Thn. 20XX	Realisasi s.d	Prognosa	Selisih (%)
Piutang kepada				
Piutang kepada				
Jumlah				

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

9

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20XX+1

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI

1. Faktor Internal

(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun yang akan datang secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).

.....

.....

a. Kondisi Pelayanan

(Mengambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- pelayanan;
 - keuangan;
 - organisasi dan sumber daya manusia;
 - sarana dan prasarana)
-
-

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2. Organisasi dan SDM

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

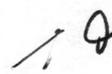
3. Keuangan

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).



4. Sarana dan Prasarana

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2. Faktor Eksternal

a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

.....
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO).

.....
.....

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS

.....
.....

d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....
.....

10

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

.....
.....

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan yang sejenis

.....
.....

g. Keadaan persaingan dengan industri yang sejenis

.....
.....

h. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

.....
.....

i. Perkembangan teknologi peralatan kedokteran

.....
.....

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN

1. ASPEK MAKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20XX	PROGNOSA 20XX+1	Ket
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat Inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan Pasar (%)			
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)			
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)			
6.	Dst.....			

(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah).

9

2. ASPEK MIKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20XX	PROGNOSA 20XX	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi PSO/Subsisi Pemda			
2.	Perubahan tarif layanan			
3.	Pengembangan produk baru			
4.	Peningkatan volume layanan			
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan			
6.	dst.....			

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

1. a. Pelayanan (berdasarkan Volume pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Kunjungan Rawat Jalan				
2	Kunjungan IGD				
3	Pasien Rawat Inap				
4	B O R				
5	L O S				
6	T O I				
7	dst...				

1. b. Pelayanan (berdasarkan unit pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Instalasi Gawat Darurat				
2	Instalasi Rawat Jalan				
3	Instalasi Rawat Inap				
4	Instalasi Rawat Intensif				
5	Instalasi Bedah Sentral				
6	Instalasi Laboratorium				
7	Instalasi Radiologi				
8	Instalasi Rehabilitasi Medik				
9	Instalasi Ked Forensik & ML				
10	Instalasi Farmasi				
11	Pelayanan Fungsional				

8

	Lainnya				
12	Instalasi CSSD				
13	Instalasi Sanitasi				
14	Instalasi IPSRS				
15	Instalasi Gizi				
16	Dst.....				

2. Pendukung Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR ⁴	TARGET	KEGIATAN
1	Unit Kerja Akuntansi				
2	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
3	Unit Kerja Sekretariat				
4	Unit Kerja Diklat				
5	Unit Kerja Pelayanan				
6	Unit Kerja Penunjang				
7	Unit Kerja Kepegawaian				
8	Unit Kerja Keperawatan				
9	Dst.....				

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

a. Program

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.

b. Kegiatan

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan,

E. PERKIRAAN PENDAPATAN

1. Pendapatan BLUD

NO.	SUMBER PENDAPATAN	PROGNOSA TH. 20XX	PERKIRAAN TH. 20XX+1
1	Jasa Pelayanan		
2	Hibah		
3	Kerjasama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

⁴ Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit

NO.	UNIT LAYANAN	PROGNOSA TH. 20XX	PERKIRAAN TH. 20XX+1
1	Layanan Rawat Jalan		
2	Layanan Rawat Inap		
3	Layanan Rawat Intensif		
4	Layanan Bedah Sentral		
5	Layanan Laboratorium		
6	Layanan Radiologi		
7	Layanan Rehabilitasi Medik		
8	Layanan Pelayanan Kedokteran Forensik dan Mediko Legal		
9	Layanan Farmasi		
10	Layanan CSSD		
11	Layanan Sanitasi		
12	Layanan IPSRS		
13	Dst.....		
	Jumlah Pendapatan Pelayanan		
1	Unit Kerja Akuntansi		
2	Unit Kerja Keuangan/Anggaran		
3	Unit Kerja Sekretariat		
4	Unit Kerja Diklat		
5	Unit Kerja Pelayanan		
6	Unit Kerja Penunjang		
7	Unit Kerja Kepegawaian		
8	Unit Kerja Keperawatan		
9	Dst.....		
	Jumlah Pendapatan Pendukung Pelayanan		
	JUMLAH PENDAPATAN JASA LAYANAN		

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

F. PERKIRAAN BIAYA

(Perkiraan biaya BLUD berasal dari biaya kegiatan masing-masing unit layanan, jumlah unit layanan disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD, contoh berikut ini adalah biaya untuk unit layanan IGD) :

1. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

No	UNIT KERJA/PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL		BIAYA NON OPERASIONAL	JUMLAH
		Biaya Pelayanan	Biaya Umum & Admin.		
1	UNIT PELAYANAN				

→ 8

a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				
f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				
n.	Instalasi Gizi				
o.	Dst.....				
2	UNIT PENDUKUNG PELAYANAN				
a	Unit Kerja Akuntansi				
b	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
c	Unit Kerja Sekretariat				
d	Unit Kerja Diklat				
e	Unit Kerja Pelayanan				
f	Unit Kerja Penunjang				
g	Unit Kerja Kepegawaian				
h	Unit Kerja Keperawatan				
i	Dst.....				
	TOTAL BIAYA				

2. Biaya Berdasarkan Komponen dan Anggarannya

(Dalam hal terdapat kesulitan untuk pengelompokan biaya pada setiap unit layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut) :

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
I. Biaya Operasional	
A. Biaya Pelayanan	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Bahan	
3. Biaya Jasa Pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya Barang dan Jasa	
6. Biaya Depresiasi dan Amortisasi	
7. Biaya Pelayanan Lainnya	
B. Biaya Umum dan Administrasi	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Administrasi Kantor	
3. Biaya Pemeliharaan	
4. Biaya Barang dan Jasa	
5. Biaya Promosi	
6. Biaya Depresiasi dan Amortisasi	

— 0

7. Biaya Umum dan Adm. lainnya	
II. Biaya Non Operasional	
1. Biaya Bunga	
2. Biaya Administrasi Bank	
3. Biaya pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai Kurs	
5. Biaya Non Operasional lainnya	
Jumlah Biaya (I+II)	

G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI

1. Perkiraan Penerimaan Investasi

NO	JENIS INVESTASI	PROGNOSA TH. 2013	PERKIRAAN TH. 2014	KET
1.	Pelepasan aset			
a.	Kendaraan			
b.	Mesin			
c.	Dst.....			
2.	Pencairan investasi			
a.	Pencairan deposito			
b.	Penjualan surat berharga			
c.	Dst.....			
	Jumlah			

2. Pengeluaran Investasi

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pembelian tanah				
.....				
.....				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian kendaraan				
.....				
.....				
5. Pembelian Peralatan Kantor				
.....				
.....				

6.	Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
				
				
7.	Pembelian surat berharga jangka panjang				
				
				
8.	Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi				
				
				
9.	Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
				
				
	Jumlah Pengeluaran Investasi				

H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN

1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan

NO	JENIS PENDANAAN	PROGNOSA TH. 20XX	PERKIRAAN TH. 20XX+1	KET
1.	Penarikan Pinjaman dari			
2.	Dst.....			
	Jumlah			

2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok.....				
b. bunga dan administrasi....				
c. Komisi, provisi, denda				
2. Dst				
.....				
Jumlah				

I. ANGGARAN BLUD

(Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD).

1. Anggaran Pendapatan BLUD Berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	PROGNOSA TH. 20XX	PROYEKSI TH. 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TH. 20XX+2	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a.				
	b.				
	c. Dst				
2.	Hibah				
	a.				
	b.				
3.	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan				
	b. Hasil kerjasama dengan				
	c. Dst ⁵				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst				
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. keuntungan penjualan aset.				
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.				
	c. jasa giro/bunga.				
	d. dividen.				
	e. Dst				
	Jumlah				

⁵ dimungkinkan ada lampiran tersendiri

9

2. Anggaran Biaya (Basis Kas)

a. Anggaran Biaya Berdasarkan Sumber

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A	BIAYA PELAYANAN							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
							
2	Biaya Bahan							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
							
3	Biaya Jasa Pelayanan							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
							
4	Biaya Pemeliharaan							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
5	Biaya Barang dan Jasa							
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							
							
6	Biaya Depresiasi							
							
7	Biaya Pelayanan Lainnya							
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
							
							
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3.							
							
2	Biaya Adm. Kantor							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
							
3	Biaya pemeliharaan							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
							
4	Biaya Barang dan Jasa							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan fhak ketiga lainnya							
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet							
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI							
	4.8. Biaya Langganan Media							
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan							
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik							
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka							
	4.12. Biaya sewa							
	4.13. Biaya representasi							
							
5	Biaya Promosi							
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi							
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa							
							
6	Biaya Depresiasi							
							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
							
7	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya							
	7.1. Biaya premi asuransi							
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi							
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban							
	7.4. Biaya jasa sewa							
							
							
II. BIAYA NON OPERASIONAL								
1	Biaya Bunga							
	1.1. Biaya bunga Bank							
	1.2. Biaya bunga deposito							
	1.3.							
							
2	Biaya administrasi bank							
	1.1. Biaya administrasi bank							
	1.2. Biaya							
							
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
	1.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	1.2.							
							
4	Kerugian penurunan nilai							
	1.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	1.2.							
							
5	Biaya non operasional lainnya							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	JUMLAH
	1.1. Biaya non operasional lainnya							
	1.2.							
							
	TOTAL BIAYA							

b. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A	BIAYA PELAYANAN				
1	Biaya Pegawai				
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS				
	1.3. Lembur				
				
2	Biaya Bahan				
	2.1. Biaya Obat				
	2.2. Biaya Alkes				
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium				
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi				
	2.5. Biaya bahan makan pasien				
				
3	Biaya Jasa Pelayanan				
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis				

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis				
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan				
	3.4. Biaya jasa insentif				
	3.5. Biaya jasa pembinaan				
				
4	Biaya Pemeliharaan				
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik				
				
5	Biaya Barang dan Jasa				
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien				
	5.2. Biaya cetakan rekam medis				
				
6	Biaya Depresiasi				
				
7	Biaya Pelayanan Lainnya				
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya				
	7.2. Biaya				
				
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1	Biaya Pegawai				
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS				
	1.3.				
				
2	Biaya Administrasi Kantor				
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman				

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
	2.2. Biaya ATK				
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan				
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut				
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor				
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu				
				
3	Biaya pemeliharaan				
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan				
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan				
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi				
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi				
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya				
				
4	Biaya Barang dan Jasa				
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi				
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan				
	4.3. Biaya bahan bakar				
	4.4. Biaya gas dapur				
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya				
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet				
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI				
	4.8. Biaya Langganan Media				
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan				
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik				
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka				
	4.12. Biaya sewa				
	4.13. Biaya representasi				

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
				
5	Biaya Promosi				
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi				
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa				
				
6	Biaya Depresiasi				
				
7	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya				
	7.1. Biaya premi asuransi				
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi				
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban				
	7.4. Biaya jasa sewa				
				
II. BIAYA NON OPERASIONAL					
1	Biaya Bunga				
	1.1. Biaya bunga Bank				
	1.2. Biaya bunga deposito				
	1.3.				
				
2	Biaya administrasi bank				
	2.1. Biaya administrasi bank				
	2.2. Biaya				
				
3	Kerugian penjualan aset tetap				
	3.1. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
	3.2.				

8

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20XX+1			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
				
4	Kerugian penurunan nilai				
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai				
	4.2				
				
5	Biaya non operasional lainnya				
	5.1. Biaya non operasional lainnya				
	5.2.				
				
TOTAL					

0

3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)

NO	URAIAN	PROGNOSA TH. 20XX	PROYEKSI TH. 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TH. 20XX+2	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatan jasa layanan				
				
				
2.	Pendapatan hasil kerjasama				
				
				
3.	Pendapatan hibah				
				
				
4.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
				
				
	Jumlah				

3. Anggaran Belanja (Basis Kas)

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
I.	BIAYA OPERASIONAL							
A	BIAYA PELAYANAN							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
							
2	Biaya Bahan							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
							
3	Biaya Jasa Pelayanan							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
							
4	Biaya Pemeliharaan							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
							
5	Biaya Barang dan Jasa							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							
							
6	Biaya Depresiasi							
							
7	Biaya Pelayanan Lainnya							
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
							
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI							
1	Biaya Pegawai							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3.							
							
2	Biaya Adm. Kantor							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
							
3	Biaya pemeliharaan							
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
							
4	Biaya Barang dan Jasa							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya							
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet							
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI							
	4.8. Biaya Langganan Media							
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan							
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik							
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka							
	4.12. Biaya sewa							
	4.13. Biaya representasi							
							
5	Biaya Promosi							
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi							
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa							
							
6	Biaya Depresiasi							
							
							

6

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
7	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya							
	7.1. Biaya premi asuransi							
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi							
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban							
	7.4. Biaya jasa sewa							
							
							
II. BIAYA NON OPERASIONAL								
1	Biaya Bunga							
	1.1. Biaya bunga Bank							
	1.2. Biaya bunga deposito							
	1.3.							
							
2	Biaya administrasi bank							
	2.1. Biaya administrasi bank							
	2.2. Biaya							
							
3	Kerugian pelepasan aset tetap							
	3.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	3.2.							
							
4	Kerugian penurunan nilai							
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	4.2.							
							
5	Biaya non operasional lainnya							
	5.1. Biaya non operasional lainnya							

7
B

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	5.2.							
							
	TOTAL BIAYA							

6
A

5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)

a. Anggaran Penerimaan Investasi

NO	JENIS INVESTASI	PROGNOSA TH. 20XX	PROYEKSI TH. 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TH. 20XX+2
1.	Pelepasan aset			
a.	Kendaraan			
b.	Mesin			
c.	Dst.....			
2.	Pencairan investasi			
a.	Pencairan deposito			
b.	Penjualan surat berharga			
c.	Dst.....			
	Jumlah			

0

b. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Sumber Dana

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 2014						JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	LAIN-LAIN	
1	Perolehan Tanah							
2	Perolehan Peralatan dan Mesin							
3	Perolehan Gedung dan Bangunan							
4	Perolehan Kendaraan							
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor							
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan							
7	Pengeluaran pembelian surat berharga							
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi							
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya							



6

c. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Jenis Belanja

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BRG/JS	BELANJA MODAL	
1	Perolehan Tanah				
2	Perolehan Peralatan dan Mesin				
3	Perolehan Gedung dan Bangunan				
4	Perolehan Kendaraan				
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan				
7	Pengeluaran pembelian surat berharga				
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi				
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya				
	JUMLAH				

10

6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

a. Anggaran Penerimaan Pendanaan

NO	JENIS PENDANAAN	PROGNOSA TH. 20XX	PROYEKSI TH. 20XX+1	PERKIRAAN MAJU TH. 20XX+2
1.	Penarikan Pinjaman dari			
2.	Dst.....			

4

b. Anggaran Pengeluaran Pendanaan

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20XX+1						JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	LAIN-LAIN	
1	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok							
	b. Bunga dan Administrasi							
	c. Provisi, denda,							
2	Dst.....							
							

1
D

c. Anggaran Pengeluaran Pendanaan berdasar Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Barang & Jasa	Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Pembayaran Pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan administrasi.....						
c.	Komisi, provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	JUMLAH						

J. AMBANG BATAS RBA

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah.....% dari anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

(Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran 2012, dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 2012:

Tabel berikut adalah data Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2009 s.d 2011).

(dalam juta)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/ Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 =(4-3)	6 =(5/3X100)
1	2009	5.000	7.000	2.000	40,00
2	2010	9.000	11.000	3.000	33,33
3	2011	11.000	15.000	4.000	36,36
Jumlah					109,69

(Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2012 = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012.

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas = $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,- = \text{Rp } 4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 13.000.000.000,- + Rp 4.752.800.000,-) = Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah).

BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX+1

Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:

1. Dapatkan prognosa laporan keuangan Tahun Anggaran 20XX sebagaimana tersaji pada Bab II, terdiri dari prognosa :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain :
 - a. Piutang akhir tahun yang dianggarkan;
 - b. Persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan
 - c. Hutang akhir tahun yang dianggarkan.
3. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari BAB III) :
 - a. Aktivitas Operasional, terdiri dari:
 - 1) Aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan (akrual);
 - 2) Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (akrual);
 - 3) Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiban jangka pendek; dan
 - 4) Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.
 - b. Aktivitas Investasi, terdiri dari:
 - 1) Pembelian/ Belanja Aset Tidak Lancar;
 - 2) Penerimaan hasil investasi; dan
 - 3) Penjualan/Penghentian Investasi.
 - c. Aktivitas Pendanaan
Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.
4. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3.
5. Siapkan Worksheet (Kertas Kerja) Laporan Keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja Laporan Operasional maupun kertas kerja Neraca.
6. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain :
 - a. Penyisihan piutang;
 - b. Pendapatan yang masih harus diterima;
 - c. Penurunan nilai persediaan;
 - d. Penyusutan dan amortisasi;
 - e. Penurunan nilai aset tetap;
 - f. Provisi/kewajiban estimasian;
 - g. Biaya yang masih harus dibayar; dan
 - h. Reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).
7. Menyajikan Laporan Keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan Laporan Keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:
 - a. Proyeksi Neraca :
 - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom neraca;
 - 2) Sajikan sesuai format neraca.
 - b. Proyeksi Laporan Operasional:
 - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom Laporan Operasional;
 - 2) Kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;

10

- 3) Kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian;
 - 4) Sajikan sesuai format laporan operasional.
- c. Laporan Arus Kas :
- 1) Menggunakan metode tidak langsung; atau
 - 2) Menggunakan metode langsung.
- d. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan :
- 1) Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan; ditambah
 - 2) Rincian pos-pos (optional).

1 8

A. NERACA

PROYEKSI NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES Th. 20XX (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES Th. 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			JML Rp	%
1	2	3	4	5
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst				
Jumlah Aset Lancar.				
B. Investasi Jangka Panjang				
C. Aset Tetap				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
D. Aset Lain-lain.				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst.....				
Jumlah Aset Lain-lain				
Jumlah Aset (A+B+C+D)				
II. KEWAJIBAN				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar.				
4. Utang jangka panjang				

10

1	2	3	4	5
5. Pendapatan yang diterima di muka				
6. Dst.....				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
B. Kewajiban Jangka Panjang.				
1. Utang jangka panjang				
2. Dst.....				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.				
Jumlah Kewajiban (A+B)				
III. EKUITAS				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen ⁶				
3. Terikat Temporer ⁷				
4. Hibah ⁸				
5. Donasi				
6. Dst				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)				

⁶ Seperti: APBD yang untuk Investasi.

⁷ Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

⁸ Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

10

B. LAPORAN OPERASIONAL

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TH. 20XX (Rp)	PROYEKSI TH. 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			JML Rp	%
1	2	3	4	5
A. Pendapatan				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)				
B. Biaya Operasional				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
Jumlah Biaya Operasional (1+2)				
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)				
C. Pendapatan Non Operasional				
D. Biaya Non Operasional				
Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian				
Surplus /(Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih				

1 9

C. LAPORAN ARUS KAS

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX+1
(Metode langsung)

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TH. 20XX (Rp)	PROYEKSI TH. 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
Arus Kas Masuk				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
Arus Kas Keluar				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar ⁹				
2. Hasil investasi				
3. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst.....				
Arus Kas Bersih dari				

⁹ Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/saham)

Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

**PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20XX+1
(Metode tidak langsung)**

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TH. 20XX (Rp)	PROYEKSI TH. 20XX+1 (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				
d. Dst.....				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang Usaha				
b. Utang Pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar.				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional				

→ 0

B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar ¹⁰				
2. Hasil investasi				
3. Dst.....				
Arus Kas Keluar				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst				
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih				
Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN.

**CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 20XX+1**

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, memuat informasi lebih lanjut tentang:

a. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan

Menjelaskan pos-pos laporan keuangan termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (disclosure). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1). Kas dan setara kas, terdiri dari :

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES. TH. 20XX+1 (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES. TH. 20XX+1 (Rp)
1	2	3
<i>Kas di bendahara penerimaan</i>		
<i>Kas di bendahara pengeluaran</i>		
<i>Giro Bank</i>		

→ 8

Giro Bank		
Tabungan Bank		
Tabungan Bank		
Deposito Bank		
Deposito Bank		
JUMLAH		

2). Piutang usaha, terdiri dari:

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES. TH. 20XX (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES. TH. 20XX+1 (Rp)
1	2	3
Piutang kepada		
Piutang kepada		
Piutang kepada		
JUMLAH		

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

2

BAB V
PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI KEGIATAN

BLUD

(Memuat antara lain tentang: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas).

B. KESIMPULAN

(Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu).

....., 20XX

BLUD RSUD/RSJD

Pemimpin BLUD

(.....)

19

LAMPIRAN

(Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

**RINGKASAN RBA
UNTUK KONSOLIDASI DENGAN APBD**

(Contoh Ringkasan Anggaran RSUD dr. Moewardi Tahun 2011)

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011	RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan	: 1.02 - KESEHATAN	
Organisasi	: 1.02.02 - RSUD Dr. Moewardi Surakarta	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	146.000.000.000
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.000.000.000
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	146.000.000.000
4.1.4.14.	Pendapatan dari BLUD	146.000.000.000
4.1.4.14.01.	Pendapatan dari BLUD.	146.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	146.000.000.000
5.	BELANJA DAERAH	216.043.798.000
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58.430.548.000
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	58.430.548.000
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	42.644.258.000
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	31.065.701.660
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.869.867.491
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	417.105.000
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	3.565.174.919
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	1.244.789.650
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.040.663.966
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	770.149.568
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	796.522
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	650.019.224
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	15.786.290.000
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	15.786.290.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	157.613.250.000
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.262.900.000
5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.125.000
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.125.000
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.750.000
5.2.1.02.03.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.750.000
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	6.239.025.000
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	6.239.025.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.307.100.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	17.000.000
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.536.905.000
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.536.905.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.545.000.000
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sosial (Pemakaman/Pemulangan/Pengin man Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah	3.540.000.000
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.750.000
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	42.750.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.470.000
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	4.470.000
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	100.000.000
5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.060.975.000
5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	136.060.975.000
5.2.3.	BELANJA MODAL	7.043.250.000
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	343.250.000

1.2

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor.	343.250.000
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.000.000.000
5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran.	2.000.000.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000.000
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan.	1.000.000.000
5.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	3.700.000.000
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	3.700.000.000
	Jumlah Belanja	216.043.798.000
	Surplus/(Defisit)	(70.043.798.000)

Semarang,

Direktur RSUD Dr. Moewardi
PROVINSI JAWA TENGAH

BASOEKI SOETARDJO
NIP. 19581018 198603 1 009

19

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD Dr. Moewardi Surakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	<u>146.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	<u>216.043.798.000</u>	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58.430.548.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	58.430.548.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	157.613.250.000	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<u>8.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.01.16.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	4.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN	3.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<u>343.250.000</u>	
1.02.1.02.02.02.05.	KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	343.250.000	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	343.250.000	

10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.12.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	<u>146.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.12.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.239.025.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.060.975.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.700.000.000	
1.02.1.02.02.17.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>70.000.000</u>	
1.02.1.02.02.17.02.	KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN RS	70.000.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.750.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.	PROGRAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	<u>3.100.000.000</u>	
1.02.1.02.02.20.01.	KEGIATAN PPKPA	40.000.000	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.03.	KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	2.000.000.000	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000	
1.02.1.02.02.20.06.	KEGIATAN PELAYANAN KRISIS	60.000.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.625.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.375.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.10.	KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN RS	1.000.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DAJAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.20.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.20.10.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000	
1.02.1.02.02.21.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	<u>100.000.000</u>	
1.02.1.02.02.21.20.	KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM RS	100.000.000	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.3	BELANJA MODAL	-	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO